

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat beberapa perusahaan sektor perbankan di Indonesia telah mengalami naik turun kinerja keuangan sejak beberapa beberapa akhir tahun ini. Menurunnya kinerja keuangan sehingga menyebabkan bank harus selektif untuk mencegah naiknya rasio *non performing loan* (NPL). Di tengah krisis energi dan pangan global sekarang ini, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih bisa dibilang lebih baik dari negara lain. Namun dibalik keadaan ini, terdapat ancaman kredit yang bermasalah (*non performing loan*). Jika ancaman itu gagal ditanggulangi oleh pemerintah, perekonomian ini akan menurun, bahkan mengarah pada resesi. *Non performing loan* adalah salah satu cara utama untuk menilai kinerja bank, karena NPL yang tinggi adalah tanda gagalnya bank dalam mengelola timbul nya masalah *likuiditas* (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), *rentabilitas* (hutang tidak dapat ditagih), dan *solvabilitas* (modal berkurang) menurut Usman (2016).

Kinerja keuangan merupakan suatu pengakuan pendapatan ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menampilkan sesuatu yang dapat dilihat bahwa perusahaan itu baik atau buruk dalam operasional dan aktivitas kegiatan yang dilakukannya. Serta, kinerja keuangan dapat memperlihatkan sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan perbankan tersebut. Menurut Fahmi (2012) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah sejauh mana analisis yang dilakukan suatu perusahaan dalam menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tekanan kredit bermasalah terus membayangi kinerja keuangan perbankan hingga akhir tahun 2017. Sejumlah bank terpaksa merelakan triliunan labanya untuk pencadangan kredit macet. Salah satu bank yang mengalami lonjakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) adalah Bank CIMB Niaga mencapai 4% terhadap total kredit. Rasionya naik pesat 54%

dibandingkan setahun sebelumnya yang masih sebesar 2,6%. Risiko kredit sangat berpengaruh khususnya untuk bank-bank yang memiliki sumber pendanaan terbatas dan kurang stabil. Risiko kredit ini adalah rasio penjualan kredit bermasalah plus kredit macet ditambah lagi dengan kredit yang diragukan (okezone.com, 2017).

Menurut Aprianingsih dan Yushita (2016), perekonomian di Indonesia masih terlihat lemah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dikarenakan rendahnya kesadaran setiap perusahaan untuk melakukan pelaporan kinerja keuangan serta kurangnya pengawasan dari aktivitas manajemen perusahaan. Keadaan ini tentunya disebabkan karena terdapat persaingan ekonomi secara ketat di era globalisasi dan pasar bebas kelas internasional. Akibatnya bank menjadi tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas, hal ini berdampak pada kelangsungan modal perbankan dan permasalahannya dengan para *stakeholdersnya* sehingga banyak perusahaan perbankan di Indonesia mengalami kerugian. Kerugian yang dialami bank ini semakin terasa yang mengakibatkan kebangkrutan. Pada saat itu, sedikit penegakan terhadap bank-bank yang sudah melanggar ketentuan seperti adanya konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Maka dari itu, beberapa penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan sektor perbankan. Salah satu penyebab penurunan dari kinerja perbankan adalah kurangnya terapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berimbas pada penurunan kinerja keuangan perbankan. Menurut laporan pada World Bank, krisis ekonomi yang menerjang negara ASEAN disebabkan oleh penurunan kinerja perbankan yang terjadi karena gagalnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kegagalan ini berasal dari sistem kerangka hukum yang cukup kurang baik, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga praktik perbankan yang tidak baik sehingga memperlihatkan kehilangan kepercayaan masyarakat (Khodary, 2016).

Beberapa perusahaan juga sangat intens memantau bagaimana perkembangan kinerja dari sebuah perusahaan. Kemampuan manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam suatu perusahaan, tetapi dalam pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan masih tidak berjalan dengan kinerja perusahaan dan juga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan. Untuk pencapaian yang maksimal dibutuhkan suatu tata kelola perusahaan yang baik dengan kata lain *Good Corporate Governance* (Ekundayo, 2017).

Menurut Effendi (2016) pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian dari dalam perusahaan yang mempunyai tujuan utama yaitu mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnisnya dengan cara keamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan penerapannya untuk semua entitas usaha terutama entitas perbankan. Hal ini dikarenakan dari visi dan misi perbankan yang menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu misi yang ingin dicapai perbankan. *Good Corporate Governance* berfokus untuk menjaga seluruh kepentingan *stakeholders*. Selain itu, sektor perbankan berlandaskan pada kepercayaan nasabah sehingga menerapkan *Good Corporate Governance* menjadi faktor utama dalam memelihara kepercayaan nasabah, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (Masitoh & Hidayah, 2018).

Selain itu, menurut Effendi (2016) dalam penerapan *Good Corporate Governance*, banyak terjadi perseteruan kepentingan yang dilihat dalam teori keagenan yang mengakibatkan adanya *moral hazard*. Hubungan keagenan akan keluar ketika satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain (*principal*) atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan sebuah jasa kemudian melimpahkan wewenangnya terhadap agen tersebut. Sebagai seorang manajer, haruslah mengetahui tentang keadaan perusahaan baik dalam keadaan buruk atau tidak dibandingkan dengan seorang pemegang saham. Seorang manajer juga harus

mempunyai kewajiban untuk memberitahu setiap informasi secara detil terhadap pemilik perusahaan. Tentunya, permasalahan agensi dapat memicu biaya keagenan yang ditekan dengan adanya suatu struktur kepemilikan dalam perusahaan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (Taufiq, 2017).

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase total saham yang dimiliki oleh manajemen, sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. yang merupakan salah satu aspek *Good Corporate Governance*. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan seorang manajer dalam mengelola perusahaannya yang akan berdampak pada kinerja keuangan sebuah perusahaan khususnya sektor perbankan (Kurniawan, 2016).

Kepemilikan institusional yaitu aspek dari *Corporate Governance* yang dipandang dapat mengurangi *agency cost*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional merupakan sumber pokok kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh seorang manajer. Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya. Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat memberikan hasil pengawasan yang lebih kuat sehingga dapat menjembatanni perilaku *opportunistic* oleh seorang manajer, yaitu seorang manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Selain itu, pengawasan yang bagus dan relevan dari investor institusional akan membuat lebih sedikit terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang dikedepannya akan mempengaruhi laba perusahaan pada laporan keuangan perusahaan. sehingga

laporan keuangan perusahaan nantinya akan memberikan nilai suatu kinerja keuangan suatu perusahaan itu sendiri (Ardalan, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Sarafina dan Saifi (2017). Pada penelitian sebelumnya, variabel dependen atau terikat diukur dengan *Return On Asset* (ROA) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki menurut Kasmir (2016). Pada hasil ini peneliti mengganti alat ukur kinerja keuangan (variabel dependen) dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dengan alasan menurut Harun (2016), NPL diharapkan mampu melihat kegagalan suatu perusahaan perbankan baik mengelola bisnis atau mengukur tingkat kemacetan yang dirasakan oleh bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Nilai rasio NPL yang kecil menunjukkan bahwa tingkat masalah dalam pengkreditan adalah kecil, sebaliknya ketika nilai rasio NPL tinggi menunjukkan tingkat masalah pengkreditan adalah besar. Peneliti menambah dua variabel independen atau bebas, yaitu: kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah salah satu bentuk dari mekanisme struktur kepemilikan. Menurut teori agensi, struktur kepemilikan merupakan suatu cara untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya suatu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Apabila suatu konflik antara manajer dan pemegang saham tidak dapat diatasi maka kinerja suatu perusahaan akan mengalami kegagalan seperti tidak stabilnya mekanisme suatu perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perbankan, serta masalah, kasus-kasus dan skandal-skandal ekonomi yang muncul karena penerapan *Good Corporate Governance* yang tidak sesuai dan kemudian adanya suatu struktur kepemilikan akan mempengaruhi seorang manajer dalam pelaporan kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari materi pokoknya, penelitian ini mempunyai batasan ruang lingkup yaitu:

1. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017.
2. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan (*Non Performing Loan*).
3. Variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah komisaris independen secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui besarnya dampak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para *stakeholders* di perusahaan perbankan.

2. Bagi para akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

1. 6. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi, statistik deskriptif, pengujian dalam analisis model regresi dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan dan saran untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN